

DIFUSI INOVASI SISTIM INFORMASI DAN KINERJA PROSES INTERNAL PEMERINTAHAN DESA DESTINASI WISATA: KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Zaitul

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Indonesia
Email: zaitul@bunghatta.ac.id

Desi Ilona*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang, Indonesia
Email: desiilona@upiyptk.ac.id

Neva Novianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Indonesia
Email: nevanovianti@bunghatta.ac.id

Fathiya Ayu Widiningsih

Alumni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia
Email: fathiyawidiningsih@gmail.com

ABSTRAK

Peran penting difusi inovasi sistim informasi/teknologi dalam menunjang jalan organisasi sudah didokumentasikan oleh penelitian sebelumnya. Namun, penelitian gagal memberikan perhatian pada pemerintahan desa destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh difusi inovasi sistim informasi terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa. Selain itu, penelitian juga melihat pengaruh variabel TOE, kebermanfaatan teknologi, terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa. Peran sebagai moderator juga diujikan pada variabel kebermanfaatan teknologi. Dengan menggunakan 32 responden yang mewakili delapan pemeritahan desa destinasi wisata dan smart pls digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi inovasi sistim informasi berdampak positif terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa. Selain itu, kebermanfaatan teknologi berperan sebagai full moderator antara difusi inovasi sistim informasi dengan kinerja proses internal pemerintahan desa. Hasil penelitian ini berimplikasi pada integrasi dua teori yaitu Resources Based View dan TOE. Dengan kata lain, dua teori ini bisa menjelaskan variasi kinerja pemerintahan desa destinasi wisata.

Keywords: difusi inovasi sistim informasi, kebermanfaatan teknologi, kinerja proses internal

Latar Belakang

Otonomi daerah yang luas sesuai Undang-Undang No. 32, 2004, pada Kabupaten dan Kota memberikan wewenang yang seluas dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di desa, serta juga memberikan manfaat seperti pendidikan politik untuk peningkatan kualitas demokrasi, efisiensi pelayanan public, percepatan pembangunan desa dan menciptakan cara berpemerintahan

yang baik (Fitria dan Wibisono, 2019). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berhasil menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, dan pemerintah pusat memberikan aliran dana tambahan kepada desa diluar alokasi dana desa yang sudah diterima desa setiap tahunnya, yaitu dana desa (Rulyanti et al., 2017). Pemerintah pusat mengucurkan dana desa sebanyak Rp. 400 triliun dari 2019 sampai 2024 (Kompas, 2019). Namun sampai tahun 2019, 158 kasus kecurangan atas dana desa telah ditemukan (Detik, 2019). Kasus kecurangan di pemerintahan desa diantaranya adalah mark-up alokasi dana desa dan kecurangan dalam pelayanan administrasi pada masyarakat (Susan dan Budirahayu, 2018). Permasalahan lain pemerintahan desa adalah rendahnya kinerja pemerintahan desa yang diukur dari realisasi rasio Pendapatan Asli Desa (PAN) dengan realisasi Total Pendapatan Pemerintahan Desa, dengan menilai kinerja tersebut melalui dimensi tanggungjawab, kualitas pelayanan, produktivitas dan akuntabilitas (Asmawati et al., 2018). Permasalahan kinerja pemerintahan juga diungkapkan oleh peneliti sebelumnya (Rulyanti et al., 2017).

Keberhasilan pembangunan desa bukan hanya terletak pada kemampuan pemerintahan desa saja, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan tersebut (Rudiadi et al., 2021). Ali dan Saputra (2020) menyimpulkan bahwa kinerja pemerintahan desa sangat tergantung dari penerapan tata kelola pemerintahan desa dan sumberdaya manusia. Kinerja pemerintahan desa juga sangat ditentukan juga oleh beberapa faktor diantaranya adalah sistim keuangan desa (Watulingas et al., 2019), pengelolaan keuangan dan sistim akuntansi keuangan (Sunarti et al., 2018), motivasi, dan sistim informasi desa (Sudaryati dan Heriningsih, 2019), budaya organisasi (Sudaryati dan Heriningsih, 2019; Widasari dan Dwija Putri, 2018), kepuasan masyarakat desa (Nurmantoro dan Kamali, 2020), digitalisasi dokumen (Anwar dan Rohman, 2020), dan pemanfaat teknologi (Lestari dan Handayani, 2020; Lubis et al., 2020; Nurjaya et al., 2021).

Difusi inovasi sistim informasi (Difusion of IS *innovation* atau DISI) dalam organisasi merupakan aspek penting dalam menunjang kinerja organisasi. Teori sumber daya atau *resources base theory* (Barney, 1991) mengemukakan bahwa sumberdaya organisasi, seperti sumberdaya informasi, yang mempunyai nilai tambah, langka, tidak mudah dicontoh dan tidak mudah tergantikan, merupakan sumber unggul bersaing suatu organisasi. Adopsi sistim informasi ditingkat individu telah dijelaskan oleh beberapa teori seperti *theory of plan behavior* (Beck dan Ajzen, 1991), *technology acceptance model* (Davis, 1989), dan *unified theory of acceptance and use of technology* (Venkatesh et al., 2003; Venkatesh dan Davis, 2000). Sedangkan, *tehnology-ornization environment theory* adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan adopsi sistim informasi pada tingkat organisasi (Tornatzky dan Fleischer, 1990). Difusi inovasi sistim informasi terhubung dengan kinerja organisasi (Wu dan Chen, 2014). Namun, penelitian sebelumnya gagal memberikan perhatian pengaruh DISI terhadap kinerja pemerintahan desa. Kebermanfaatan teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Peran variabel ini dalam

mempengaruhi kinerja pemerintahan desa sudah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya (Lestari dan Handayani, 2020; Lubis et al., 2020; Nurjaya et al., 2021). Namun hasil penelitian sebelumnya tersebut masih belum dapat disimpulkan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian peran DISI dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Selain itu, peneliti juga perlu meneliti peran manfaat teknologi sebagai variable moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak DISI terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa destinasi wisata di Kota Pariaman. Penelitian ini juga menguji peran manfaat teknologi sebagai variabel moderasi antara DISI dan kinerja. Karya ilmiah ini dibagi atas lima bagian yaitu pendahuluan, teori dan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran.

Teori dan Hipotesis

Kinerja Pemerintahan Desa

Pembangunan desa pada hakekatnya bertujuan untuk membangun kemandirian desa dan menurut Undang-Undang Desa, pembangunan desa dapat menghasilkan desa yang kuat secara sosial, politik dan ekonomi bermartabat secara budaya yang biasa dikenal dengan Catur Sakti Desa (Sofyani et al., 2020). Kuat secara ekonomi, pemerintahan desa diharapkan mempunyai kinerja ekonomi yang baik. Kinerja dalam manajemen organisasi terdiri dari kinerja organisasi, kinerja kelompok (spt. Kinerja manajer), dan kinerja individu (spt. Kinerja karyawan). Kinerja Pemerintahan desa termasuk kelompok kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah seperangkat capaian yang diperoleh dari implementasi seperangkat praktik atau strategi (Alosani et al., 2020). Kinerja akan diperoleh jika organisasi mempunyai sistim pengukuran kinerja. Sistim pengukuran kinerja sudah berkembang sedemikian rupa. Sistim pengukuran kinerja yang banyak diadopsi oleh berbagai organisasi adalah sistim balanced scorecard. Balanced scorecard diperkenalkan oleh ahli dari *harvard business school* yaitu Kaplan dan Norton (Kaplan dan Norton, 1996). Penggunaan sistim pengukuran kinerja tradisional atau sistim akuntansi, seperti ROI dan ROA, menggambarkan kinerja yang sempit dan tidak menggambarkan kinerja organisasi secara keseluruhan, serta jika sangat tergantung pada sistim ini akan menghalangi nilai organisasi akan datang (Wu dan Chen, 2014). Sistim balanced scorecard terdiri dari empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan (R.S Kaplan dan Norton, 2001). Kinerja proses internal adalah kinerja operasi organisasi. Kinerja aspek ini terdiri dari proses manajemen operasi (Solano et al., 2013), proses manajemen pelanggan (Ellingson dan Wambsganss, 2001; Maiga dan Jacobs, 2003), dan proses manajemen inovasi (Hoque dan James, 2000; Yenyurt, 2003). Dukungan teknologi pada tiga aspek diatas sangatlah penting dan diprediksi berdampak terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa. Penelitian sebelumnya sangat terbatas mengkaji kinerja pemerintahan desa dengan menggunakan perspektif proses internal ini. Berbagai faktor mempengaruhi kinerja pemerintahan desa diantaranya adalah sistim informasi (Sudaryati

dan Heriningsih, 2019), dan pemanfaatan teknologi (Lestari dan Handayani, 2020; Lubis et al., 2020; Nurjaya et al., 2021).

Difusi Inovasi Sistem Informasi

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan difusi inovasi sistem informasi (diffusion of IS innovation) untuk adopsi teknologi pada pemerintahan desa. Inovasi didefinisikan sebagai yang pertama menggunakan suatu ide oleh suatu organisasi. Inovasi sistem informasi adalah inovasi organisasi menggunakan teknologi informasi. Difusi inovasi sistem informasi atau teknologi dijelaskan oleh teori difusi inovasi atau innovation diffusion theory (IDT) adalah suatu proses bagaimana inovasi di komunikasikan dengan menggunakan saluran tertentu pada anggota organisasi (Rogers, 1995). Ada beberapa model difusi inovasi dan penelitian ini menggunakan model tiga tahap yaitu inisiasi, adopsi dan implementasi (Grover dan Goslar, 1993). Inovasi adalah menggunakan suatu ide yang pertama kali oleh suatu organisasi untuk tujuan yang sama. Inovasi sistem informasi adalah inovasi dalam bidang teknologi komunikasi dan digital serta aplikasinya (Swanson dan Ramiller, 2004). Sumber daya sistem informasi dipandang sebagai sumber kinerja organisasi berdasarkan teori dari *Resources Based View* atau RBV (Barney, 1991; Lado et al., 2006). Inovasi difusi atau adopsi sistem informasi adalah kunci utama kesuksesan suatu organisasi (Zhu et al., 2006). Difusi terdiri dari beberapa tahap diantaranya adalah adopsi, implementasi dan diseminasi (Wu dan Chen, 2014). Namun penelitian sebelumnya masih terbatas meneliti tentang pengaruh difusi inovasi sistem informasi dengan menggunakan objek pemerintahan desa. Penelitian dengan menggunakan objek lain sudah diaplikasikan pada penelitian pengaruh difusi inovasi ini terhadap kinerja (Thatcher dan Oliver, 2001; Wu dan Chen, 2014). Thatcher dan Oliver (2001) menyimpulkan bahwa adopsi pada teknologi meningkatkan kemampuan menghasilkan laba dan produktivitas, serta mengurangi biaya variabel untuk merancang, mengembangkan, dan memproduksi produk sehingga meningkatkan kualitas produk dan mengenakan harga lebih tinggi pada produk yang dijual pada pelanggan. Wu dan Chen (2014) mengusulkan pengaruh inovasi adopsi sistem informasi terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka dapat dikembangkan hipotesis yang pertama yaitu.

H1: Difusi inovasi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa destinasi wisata.

Kebermanfaatan teknologi

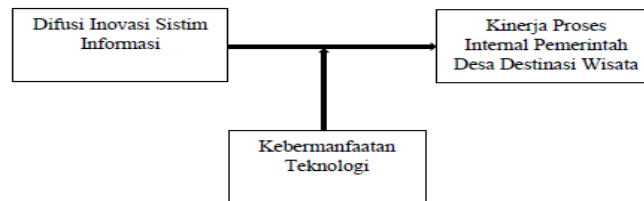
Literatur tentang difusi inovasi sistem informasi menunjukkan peran penting dari *Technology Organization Environment* atau TOE (Tornatzky dan Fleischer, 1990) sebagai pengaktif (enabler) kesuksesan proses adopsi/difusi teknologi. (Zhu et al., 2006) berpendapat bahwa TOE adalah perspektif penting dalam mensukseskan difusi inovasi teknologi dalam suatu organisasi. Kebermanfaatan teknologi merupakan salah satu komponen dari teknologi, organisasi dan lingkungan (TOE). Kebermanfaatan teknologi dari suatu organisasi sangat penting menentukan kinerja organisasi. Selain itu, interaksi kebermanfaatan teknologi dan difusi inovasi sistem informasi

berdampak terhadap kinerja organisasi (Wu dan Chen, 2014). Berdasarkan penjelasan di atas maka dikembangkan hipotesis kedua dan ketiga sebagai berikut.

H2: Kebermanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa destinasi wisata.

H3: Kebermanfaatan teknologi memoderasi hubungan antaradifusiinovasi sistim informasi dan kinerja proses internal pemerintahan desa destinasi wisata.

Untuk kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada Figur 1 dibawah ini.



Figur 1. Kerangka konseptual penelitian

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pemerintahan desa destinasi wisata di Kota Pariaman (Sumatera Barat) sebagai objek penelitian. Pemerintah Kota Pariaman merekomendasikan delapan desa wisata yaitu Desa Apar, Desa Tunggal selatan, Desa Kampung Gadang, Desa Kampung Kandang, Desa Pasir Sunur, Desa Marunggi, Desa Taluk dan Desa Pauh Barat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survey. Setiap pemerintahan desa mengisi empat kuisioner yaitu sekretaris, Kaur Umum dan Administrasi, Kaur Keuangan, dan Kaur perencanaan program. Tiga puluh dua kuisioner didistribusikan ke pemerintahan desa oleh surveyor. Surveyor menyerahkan kuisioner dan memberikan waktu tiga hari kepada pemerintahan desa untuk mengisinya. Kinerja proses internal menggunakan lima item pernyataan yang dikembangkan oleh penelitian sebelumnya (Hoque dan Adams, 2011; R. S. Kaplan dan Norton, 2004; Solano et al., 2013). Salah satu contoh pernyataan adalah “Terjadi peningkatan kualitas proses internal pemerintahan desa”. Difusi inovasi sistim informasi terdiri dari tujuh item pernyataan yang dikembangkan dari berbagai macam literatur dan digunakan juga oleh peneliti sebelumnya (Fichman, 2001). Salah satu contoh pernyataan adalah “Pemerintahan desa menggunakan sistim pengelolaan pengetahuan untuk mengelola aset intelektual pegawai”. Variabel TOE yang diwakili oleh kebermanfaatan teknologi menggunakan tiga item pernyataan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya (Wang et al., 2010). Salah satu item pernyataannya adalah “Teknologi baru membantu pemerintahan desa untuk berkomunikasi lebih baik dengan lembaga lain dan masyarakat. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala likert lima, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan software smart-pls. Pemilihan aplikasi smart-pls karena penelitian ini mengembangkan model terintegrasi dari dua model/teori yaitu RBV (Barney, 1991) dan TOE (Tornatzky dan Fleischer, 1990) dalam memecahkan masalah bervariasinya kinerja pemerintahan desa. Analisa data menggunakan smart

pls terdiri dari dua penilaian yaitu penilaian model pengukuran dan model struktural (Hair et al., 2017). Model pengukuran terdiri dari *covergent validity* dan *disriminant validity*. *convergent validity* menggunakan indikator *outer loading*, *Cronbach alpha*, *composite reliability*, dan *average variance extrated* (AVE). Sedangkan, *discriminant validity* menggunakan *Fornell-Lacker criterion*, dan *cross loading*. Seterusnya, penilaian model struktural menggunakan alat uji Q square dan R square. Uji hipotesis menggunakan nilai original sample dan nilai p.

Hasil dan pembahasan

Jumlah kusioner yang disebarkan sebanyak tiga puluh dua untuk delapan pemerintahan desa destinasi wisata di Kota Pariaman. Seluruh kuisisioner yang disebarkan dapat diambil oleh surveyor pada kantor pemerintahan desa masing masing. Profil responden yang dibagi atas lima data demografi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Umur responden bervariasi mulai dari 23 tahun sampai 56 tahun. Responden yang berumur antara 31 tahun sampai 40 tahun mendominasi sample penelitian (46,88%). Dari segi jenis kelamin, 21 responden berjenis kelamin perempuan (65,63%) dan sisanya laki-laki (28,13%). Selain umur dan jenis kelamin, penelitian ini juga mengumpulkan data demografi berupa pendidikan terakhir dan data menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai pendidikan terakhir sarjana (53,13%) dan sisanya berpendidikan diploma (6,25%) dan lainnya (34,38%). Jabatan reponden adalah sekretaris, KAUR umum, perencanaan, dan keuangan. Pengalaman reponden dominan kecil dari 5 tahun (50%) dan sisanya 5 sampai 10 tahun (28,13%), serta besari dari 10 tahun (15,63%).

Tabel 1. Data demografi responden

Data demografi	Kategori	Jumlah	Persentase
Umur	23 sd 30 tahun	11	34,38
	31 sd 40 tahun	15	46,88
	41 sd 50 tahun	3	9,38
	> 50 tahun	2	6,25
	tidak mengisi data umur	1	3,13
Jeniskelamin	Laki-laki	9	28,13
	Perempuan	21	65,63
	tidak mengisi	2	6,25
	diploma	2	6,25
Pendidikan terakhir	S1	17	53,13
	Lainnya	11	34,38
	tidak mengisi data	2	6,25
	pendidikan		
Jabatan	Sekretaris	8	25,00
	KAUR umum	8	25,00
	KAUR perencanaan	8	25,00
	KAUR keuangan	8	25,00

	< 5 tahun	16	50,00
	5 sd 10 tahun	9	28,13
Pengalaman	> 10 tahun	5	15,63
	tidak mengisi data pengalaman	2	6,25

Tahapan analisis selanjutnya adalah analisa regresi dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM). Pada penelitian ini menggunakan software smart-pls versi 3.3.3. Analisa data smart pls menggunakan dua tahap penilaian yaitu penilaian model pengukuran (measurment model assessment-MMA) dan penilaian model struktur (structural model assessment-SMA) (Hair et al., 2017). Penilaian model pengukuran menggunakan dua jenis validitas yaitu convergent validity, dan discriminant validity. Uji validitas konvergen menggunakan indikator *outer loading*, *cronbach alpha*, *composite reliability* dan *average variance extracted* (Vinzi et al., 2010). Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini. Run pertamamendapatkan satu item untuk KPI mempunyai outerloading kecil dari 0,70 dan item ini dikeluarkan dari analisa selanjutnya karena tidak sesuai dengan kriteria yang disarankan oleh ahli (Hulland, 1999). Padarun kedua, terdapat semua item sudah mempunyai outerloading besar dari 0.70. selanjutnya, nilai cronbach alpha dan composite reliability yang digunakan untuk melihat keandalan intrumen juga sudah besar dari 0.70 (R. R. Bagozzi dan Yi, 1988). Nilai Average Variance Extracted (AVE) juga sudah memuaskan karena sudah diatas 0,50 (R. P. Bagozzi, 2010). Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah valid secara konvergen.

Tabel 2. Validitas konvergen

Variabel	Item	Outer loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Difusi Inovasi sistim informasi	DISI1	0,916	0,947	0,957	0,764
	DISI2	0,929			
	DISI3	0,724			
	DISI4	0,961			
	DISI5	0,865			
	DISI6	0,864			
	DISI7	0,840			
Kinerja proses internal	kpi1	0,922	0,814	0,879	0,649
	kpi2	0,863			
	kpi4	0,707			
	kpi5	0,708			
Kebermanfaatan teknologi	kt1	0,916	0,934	0,879	0,883
	kt2	0,943			
	kt3	0,959			

Penilaian model pengukuran yang kedua adalah validitas diskriminan. Penelitian ini menggunakan dua alat uji yaitu kriteria Fornell-Lacker dan cross loading. Kriteria Fornell-Lacker diperoleh dengan cara menghitung akar dari nilai AVE suatu variable dan membandingkan dengan nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel lainnya (Jörg Henseler et al., 2015). Jika nilai akarnya lebih besar dari hubungan dengan variabel lainnya maka dapat disimpulkan bahwa kriteria Fornell-Lacker tercapai dan sebaliknya (Jörg Henseler et al., 2015). Hasil validitas diskriminan diperoleh dari hasil menghitung PLS algoritma dan lihat hasil dari kriteria kualitas bagian discriminant validity. Hasil uji validitas ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Validitas diskriminan: kriteria Fornell-Lacker

Variabel	DISI x KT	KPI	DISI	KT
DISI x KT	1,000			
Kinerja proses internal	-0,788	0,805		
difusiinovasisisteminformasi	-0,796	0,802	0,874	
kebermanfaatanteknologi	-0,754	0,768	0,888	0,940

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel mendukung validitas diskriminan karena nilai akar AVE-nya (tanda bold) besar dari hubungan dengan variabel lain. Contoh, nilai akar AVE KPI (0,805) besar dari nilai hubungannya dengan DISI (0,802), dan kebermanfaatan teknologi (0,768). Variabel lain juga menunjukkan bahwa kriteria Fornell-Lacker mendukung validitas diskriminan.

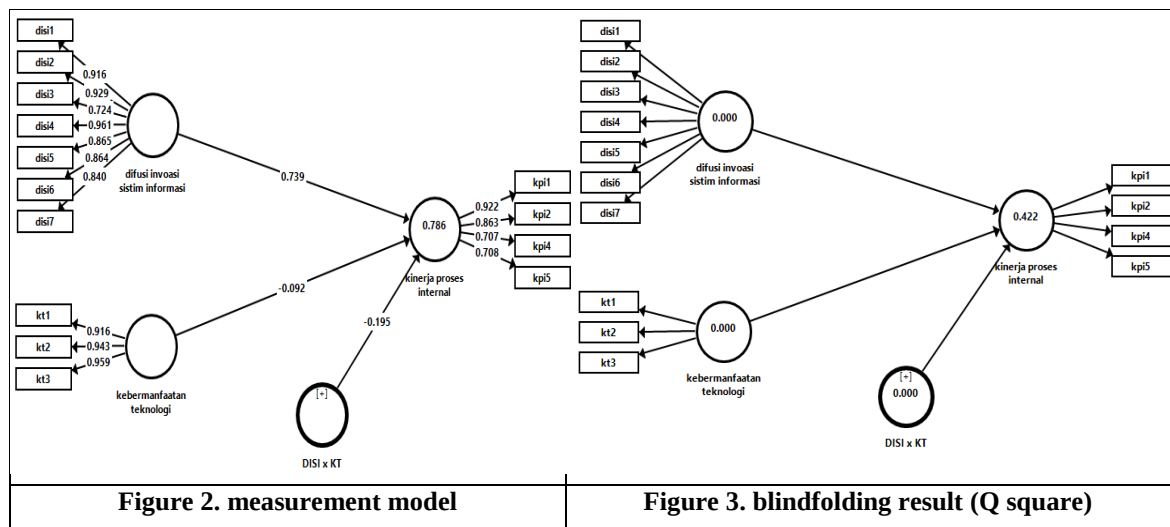
Alat uji kedua untuk validitas diskriminan adalah cross loading. Cross loading menggambarkan bahwa item pernyataan dari suatu variabel adalah milik variabel tersebut juga nilai loadingnya lebih besar ke variabel tersebut (Hair et al., 2017; Jörg Henseler et al., 2015). Misalnya, item DISI1 sampai DISI7 mempunyai loading faktor lebih tinggi ke variable DISI (ditebalkan) dibandingkan dengan loading faktor ke variabel lainnya. Begitu juga dengan item lainnya juga mempunyai loading faktor lebih tinggi ke variabel tersebut. Dari tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa hasil cross loading mendukung validitas diskriminan. Dari hasil penilaian model pengukuran dengan menggunakan validitas konvergen dan diskriminan dapat di simpulkan bahwa model pengukuran layak.

Tabel 4. Validitas diskriminan: cross-loading

Item-variabel	DISI x KT	KPI	DISI	KT
DISI1	-0,764	0,838	0,916	0,885
DISI2	-0,758	0,823	0,929	0,836
DISI3	-0,613	0,627	0,724	0,610
DISI4	-0,847	0,916	0,961	0,845
DISI5	-0,641	0,651	0,865	0,711

DISI6	-0,676	0,685	0,864	0,771
DISI7	-0,528	0,731	0,840	0,739
InteraksiDISI dan KT	1,000	-0,788	-0,796	-0,754
kpi1	-0,652	0,922	0,714	0,595
kpi2	-0,692	0,863	0,661	0,528
kpi4	-0,625	0,707	0,617	0,625
kpi5	-0,564	0,708	0,777	0,697
kt1	-0,695	0,728	0,774	0,916
kt2	-0,621	0,644	0,814	0,943
kt3	-0,794	0,779	0,909	0,959

Figur 2 dibawah adalah model pengukuran penelitian ini.



Penilaian model kedua adalah model pengukuran. Penilaian model pengukuran menggunakan alat uji Q square dan R square. Q square menunjukkan relevansi nilai prediksi model penelitian. Q square kriteria untuk mengevaluasi sebesar baik data yang dihilang dipertimbangkan dalam model ini dan dampak relatif dari model struktural suatu observed measured dari variabel bebas latent dievaluasi dengan menggunakan Q square (Jorg Henseler et al., 2009). Nilainya diperoleh dengan menggunakan menu Blindfolding dismart pls dan hasilnya menunjukkan nilai Q square sebesar 0,422 (lihat Figure 3) dan nilai ini termasuk dalam kelompok *large predictive relevance* (Jorg Henseler et al., 2009). Selanjutnya, model struktural juga dinilai dengan menggunakan R square. Indikator ini menunjukkan kekuatan prediksi dari model ini. hasil R square model penelitian ini adalah sebesar 0,786 dan nilai ini termasuk dalam kelompok *substantial* (Chin, 1998). Dari dua indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa model struktural juga layak.

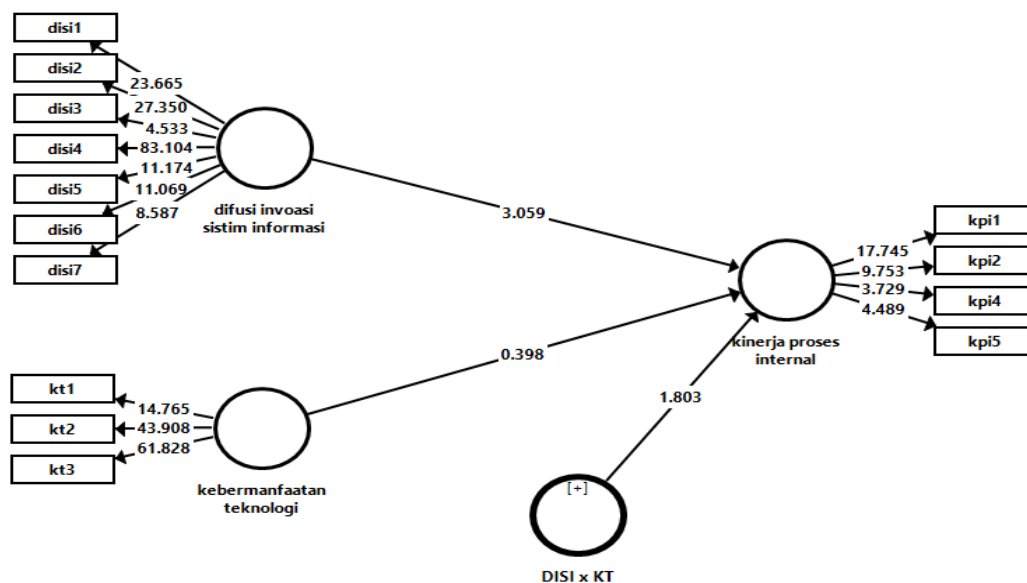
Tabel 5. Penilaian model struktural dan pengujian hipotesis

Variabel dependen	Q square	kategori	R Square	kategori
Kinerja proses internal	0,422	Besar	0,786	Subtansial

Pengaruh	Original sampel	t stat	P-value	Simpulan
difusiinovasisistiminformasi - > Kinerja proses internal	0,739	3,059	0,002***	H1 di terima
kebermanfaatantechnologi -> Kinerja proses internal	-0,092	0,398	0,691	H2 di tolak
DISI x KT -> Kinerja proses internal	-0,195	1,803	0,072*	H3 di terima

Cat. *, **, dan *** menunjukan signifikan pada 10%, 5%, dan 1%.

Hipotesis penelitian dianalisis dengan menggunakan nilai original sample (koefisien penelitian) dan nilai probability. Hasil penelitian tentang pengaruh difusi inovasi sistim informasi terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa menunjukan nilai p sebesar 0,002 ($<0,01$) dan nilai original sampel 0,739 (lihat tabel 5). Berdasarkan nilai p dan nilai original sampel, hipotesis 1 diterima dimana terdapat pengaruh inovasi difusi sistim informasi terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa pada tingkat kesalahan 1%. Nilai original sampelnya 0,739 yang berarti bahwa semakin tinggi difusi inovasi sistim informasi maka semakin tinggi kinerja pemerintahan desa. Hasil analisis kedua yaitu pengaruh kebermanfaatan teknologi terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa menunjukan bahwa hipotesis di tolak karena nilai p lebih besar dari 5% atau bahkan 10%. Hasil ini menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kebermanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintahan desa.



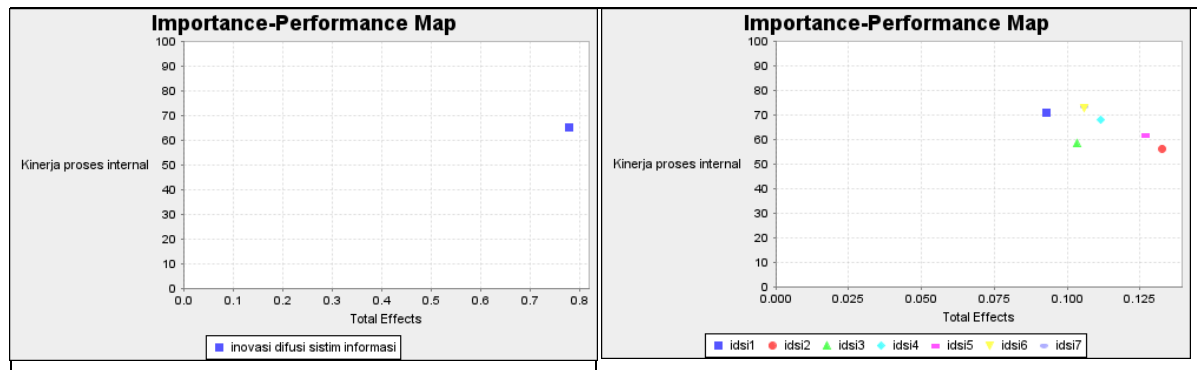
Figur 4. Model struktural

Peran kebermanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi antara difusi inovasi sistim informasi dan kinerja proses internal pemerintahan desa terbukti secara statistik pada alpha 10%. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengaruh langsung variabel kebermanfaatan teknologi terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa tidak berpengaruh ($\beta=-0,092$, $p\text{-value}=0,691$) dan interaksi kebermanfaatan teknologi dengan inovasi difusi sistim informasi berpengaruh ($\beta=-0,195$, $p\text{-value}=0,072$) pada $\alpha=10\%$ maka dapat disimpulkan bahwa peran kebermanfaatan teknologi sebagai pure moderator (Sharma et al., 1981). Tabel 7 menunjukkan deskripsi variabel penelitian dimana seluruh variabel penelitian masuk dalam kategori cukup tinggi.

Tabel 7. Analisis deskriptif variabel

Variabel	Rata-rata (skala 5)	Rata-rata (skala 100)	Kategori
Kinerja proses internal	3,927	78,540	cukup tinggi
Difusi inovasi sistim informasi	3,813	76,254	cukup tinggi
Kebermanfaatan teknologi	3,927	78,540	cukup tinggi

Penelitian ini juga menganalisis *important performance map analysis* (IPMA). Hasil analisis dapat dilihat pada bagan 3 dibawah ini. variabel inovasi difusi sistim informasi masih memiliki peluang untuk ditingkat menjadi 100% (22%) untuk mencapai peningkatan kinerja proses internal sebesar 32% lagi. Dilihat dari item pernyataan inovasi difusi sistim informasi DISI2 (0,135) dan terendah DISI1 (0,09). Beberapa item mempunyai peluang untuk ditingkatkan yaitu DISI3 dan DISI1 untuk mendapatkan kinerja yang lebih tinggi. Pengaruh variabel inovasi difusi sistim informasi (Thatcher dan Oliver, 2001; Wu dan Chen, 2014; Zhu et al., 2006) dimana inovasi difusi sistim informasi penting dalam meningkat kinerja organisasi. Penelitian ini juga menemukan adanya peran kebermanfaatan teknologi dalam memoderasi hubungan antara inovasi difusi sistim informasi dengan kinerja proses internal pemerintahan desa. Hasil analisa moderasi menemukan bahwa kebermanfaatan teknologi berperan sebagai full moderator. Hasil penelitian sejenis belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya namun TOE (Tornatzky dan Fleischer, 1990) juga menjelaskan bagaimana hubungan teknologi, organisasi dan lingkungan bisnis dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hasil penelitian konsisten dengan temuan (Wu dan Chen, 2014) yang juga menyimpulkan bahwa variabel TOE berperan dalam hubungan inisiatif adopsi teknologi dalam organisasi.



Figur 4. Important Performance Map Analysis (IPMA)

Kesimpulan dan saran

Difusi inovasi sistim informasi atau teknologi merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Interaksi kebermanfaatan teknologi sebagai variabel teknologi, organisasi dan lingkungan (TOE) dengan inovasi difusi sistim informasi telah didokumentasikan oleh penelitian sebelumnya. Namun, penelitian sebelum gagal memberikan perhatian pada pemerintahan desa, sebagai salah organisasi sektor publik, apa lagi pemerintahan desa destinasi wisata. Untuk itu, penelitian ini menginvestigasi pengaruh inovasi difusi sistim informasi terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa. Selain itu, penelitian juga melihat pengaruh variabel TOE, kebermanfaatan teknologi, terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa. Peran sebagai moderator juga diujikan pada variabel kebermanfaatan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi difusi sistim informasi berdampak positif terhadap kinerja proses internal pemerintahan desa. Selain itu, kebermanfaatan teknologi berperan sebagai full moderator antara inovasi difusi sistim informasi dengan kinerja proses internal pemerintahan desa. Hasil penelitian ini berimplikasi pada integrasi dua teori yaitu Resources Based View (Barney, 1991) dan TOE (Tornatzky dan Fleischer, 1990). Dengan kata lain, dua teori ini bisa menjelaskan kinerja pemerintahan desa dimana pemerintahan desa ini adalah jenis pemerintahan terendah di Indonesia (Antlöv, 2010; Antlöv et al., 2016). Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten/kota, dan kementerian desa bahwa untuk meningkatkan kinerja proses internal pemerintahan desa perlu meningkatkan inovasi difusi sistim informasi dengan cara menggunakan sistim komputerasi/teknologi dalam pekerjaan rutin, komunikasi dengan masyarakat dan lembaga lainnya, sistim pengambilan keputusan, sistim pengelolaan pengetahuan, dan mengupdate sesuai dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan dan terbuka bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan hasil penelitian ini. pertama, penelitian ini menggunakan sampel penelitian yang sangat terbatas yaitu 32 sampel ini disebabkan oleh jumlah pemerintahan desa sangat terbatas di Kota Pariaman. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah sampel penelitian dan menguji pada tipe pemerintahan desa lainnya. Kedua, penelitian ini hanya melihat dari dua perspektif yaitu RBV dan TOE dan peneliti selanjutnya bisa melihat dari perspektif lainnya, seperti technology acceptance model.

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih pada Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas pendanaan penelitian ini dengan nomor kontrak induk: 076/E5/PG.02.00.PT/2022, dan kontrak peneliti dengan institusi:069/LPPM-/Hatta-P/VI-2022 pada tanggal 16 Juni 2022. Terima kasih juga kami aturkan pada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bung Hatta atas motivasinya.

Referensi

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Alosani, M. S., Yusoff, R., & Al-Dhaafri, H. (2020). The effect of innovation and strategic planning on enhancing organizational performance of Dubai Police. *Innovation & Management Review*, 17(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/INMR-06-2018-0039>
- Antlöv, H. (2010). Village government and rural development in Indonesia: the new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Anwar, A. Z., & Rohman, F. (2020). Digitalisasi Dokumen Dan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa. *Abdimas Unwahas*, 5(1), 66–71.
- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2379–2401. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>
- Bagozzi, R. P. (2010). Structural equation models are modelling tools with many ambiguities : Comments acknowledging the need for caution and humility in their use. *Journal of Consumer Psychology*, 20(2), 208–214. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2010.03.001>
- Bagozzi, R. R., & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 16(1), 74–94.
- Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Beck, L., & Ajzen, I. (1991). Predicting dishonest Actions using the theory of planned behavior. *Journal of Research in Personality*, 25, 285–301.
- Chin, W. W. (1998). Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. *Management Information Systems Quarterly*, 22(1), vii–xvi. <https://doi.org/10.1684/ejd.2016.2884>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of

- Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Detik. (2019). *ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4528256/icw-158-perangkat-desa-terkena-kasus-korupsi> (0.37,4/7/19)
- Ellingson, D. A., & Wambsganss, J. R. (2001). Modifying the approach to planning and evaluation in governmental entities: “A balanced scorecard” approach. *J. Public Budg. Account. Financ. Manag.*, 13(1), 103–120.
- Fichman, R. G. (2001). The Role of Aggregation in the Measurement of IT-Related Organizational Innovation. *MIS Quarterly*, 25(4), 401–429. <https://doi.org/10.2307/3250990>
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2019). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85–98. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.808>
- Grover, V., & Goslar, M. D. (1993). The Initiation , Adoption , and Implementation of Telecommunications Technologies in U . S . Organizations. *Journal of Management Information Systems*, 10(1), 141–163. <https://doi.org/10.1080/07421222.1993.11517994>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publication. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Henseler, Jörg, Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *J. of the Acad. Mark. Sci.*, 43, 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Henseler, Jorg, Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. *Advances in International Marketing*, 20, 277–319. [https://doi.org/10.1108/S1474-7979\(2009\)0000020014](https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014)
- Hoque, Z., & Adams, C. (2011). the Rise and Use of Balanced Scorecard Measures in Australian Government Departments. *Financial Accountability & Management*, 27(3), 308–334. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2011.00527.x>
- Hoque, Z., & James, W. (2000). Linking Balanced Scorecard Measures to Size and Market Factors : Impact on Organizational Performance. *Journal of Management Accounting Research*, 12(1), 1–17.
- Hulland, J. (1999). Use of partial least square (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. *Strategic Management Journal*, 20, 195–204.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Harvard Business School Press.
- Kaplan, R.S, & Norton, P. (2001). Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strateg...: GCU Library Resources - All Subjects. *American Accounting Association*, 15(2), 147–160. <https://doi.org/10.2308/acch.2001.15.1.87>

- Kaplan, Robert S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. *Harvard Business Review*, January-February, 1–12. <https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5>
- Kompas. (2019). *Total dana desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all.%0AEditor>
- Lado, A. A., Boyd, N. G., Wright, P., & Kroll, M. (2006). Paradox and theorizing within the resource-based view. *Academy of Management Review*, 31(1), 115–131. <https://doi.org/10.5465/amr.2006.19379627>
- Lestari, A. L. A., & Handayani, N. (2020). Pengaruh partisipasi anggaran, budaya organisasi dan teknologi terhadap kinerja pemerintah aparat desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–18.
- Lubis, A., Sari, E. N., & Astuty, W. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa di kabupaten deli serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- Maiga, A. S., & Jacobs, F. A. (2003). Balanced scorecard , activity-based costing and company performance : An empirical analysis. *Journal of Managerial Issues*, 15(3), 283–301.
- Nurjaya, Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4(3), 332–346.
- Nurmantoro, M. A., & Kamali, A. S. (2020). Indeks Kepuasan Masyarakat Desa Kadudampit Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Kadudampit. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.37012/jipmht.v4i1.337>
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovation* (4th editio). The Free Press.
- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Alsukri, S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 44–58. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 323–335. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474>
- Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*, XVIII(3), 291–300.
- Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359.
- Solano, J., Ovalles, M. P. De, Rojas, T., Padua, A. G., & Morales, L. M. (2013). Integration of

- systemic quality and the balanced scorecard. *Information System Management*, 20(1), 64–79.
- Sudaryati, D., & Heriningsih, S. (2019). Pengaruh Motivasi, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 33–47. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.2913>
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 42–50. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860>
- Susan, N., & Budirahayu, T. (2018). Village Government Capacity in the Implementation of Village Law No. 6 of 2015 in Indonesia. In B. McLellan (Ed.), *Sustainable Future for Human Security* (pp. 17–27). Springer.
- Swanson, E. B., & Ramiller, N. C. (2004). Innovation mindfully with information technology. *MIS Quarterly*, 28(4), 553–583.
- Thatcher, M. E., & Oliver, J. R. (2001). The Impact of Technology Investments on a Firm 's Production Efficiency, Product Quality, and Productivity. *Journal of Management Information Systems*, 18(2), 17–45. <https://doi.org/10.1080/07421222.2001.11045685>
- Tornatzky, & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model : Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), 186–204.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. (2010). *Handbook of Partial Least Square: Concepts, Methods and Applications*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-32827-8>
- Wang, Y., Wang, Y., & Yang, Y. (2010). Technological Forecasting & Social Change Understanding the determinants of RFID adoption in the manufacturing industry. *Technological Forecasting & Social Change*, 77(5), 803–815. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2010.03.006>
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105–111. <https://doi.org/10.32400/iaj.26684>
- Widasari, K. I., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2018). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1308–1334. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p18>
- Wu, I. L., & Chen, J. L. (2014). A stage-based diffusion of IT innovation and the BSC

- performance impact: A moderator of technology-organization-environment. *Technological Forecasting and Social Change*, 88, 76–90. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.06.015>
- Yeniyurt, S. (2003). A literature review and integrative performance measurement framework for multinational companies. *Marketing Intelligence & Planning*, 21(3), 134–142. <https://doi.org/10.1108/02634500310474957>
- Zhu, K., Kraemer, K. L., & Xu, S. (2006). The Process of Innovation Assimilation by Firms in Different Countries: A Technology Diffusion Perspective on E-Business. *Management Science*, 52(10), 1557–1576. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1050.0487>